



PEMERINTAH  
KABUPATEN BANTUL

*Bantul*  
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE



# RENJA

## RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang terarah, profesional, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah;
  - b. bahwa rencana kerja perangkat daerah memuat arah kebijakan perangkat daerah yang berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

**Pasal 2**

- (1) Renja PD disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Tahun 2026.


**Pasal 3**


- (1) Renja PD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:  
BAB I : PENDAHULUAN  
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024  
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH  
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH  
BAB V : PENUTUP
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 30 Juli 2025  
BUPATI BANTUL,  
  
ABDUL HALIM MUSLIH



Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 30 Juli 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

  
AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 42

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 39 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2026

**KAPANEWON SEDAYU**

KABUPATEN BANTUL

---

# **BAB I.**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

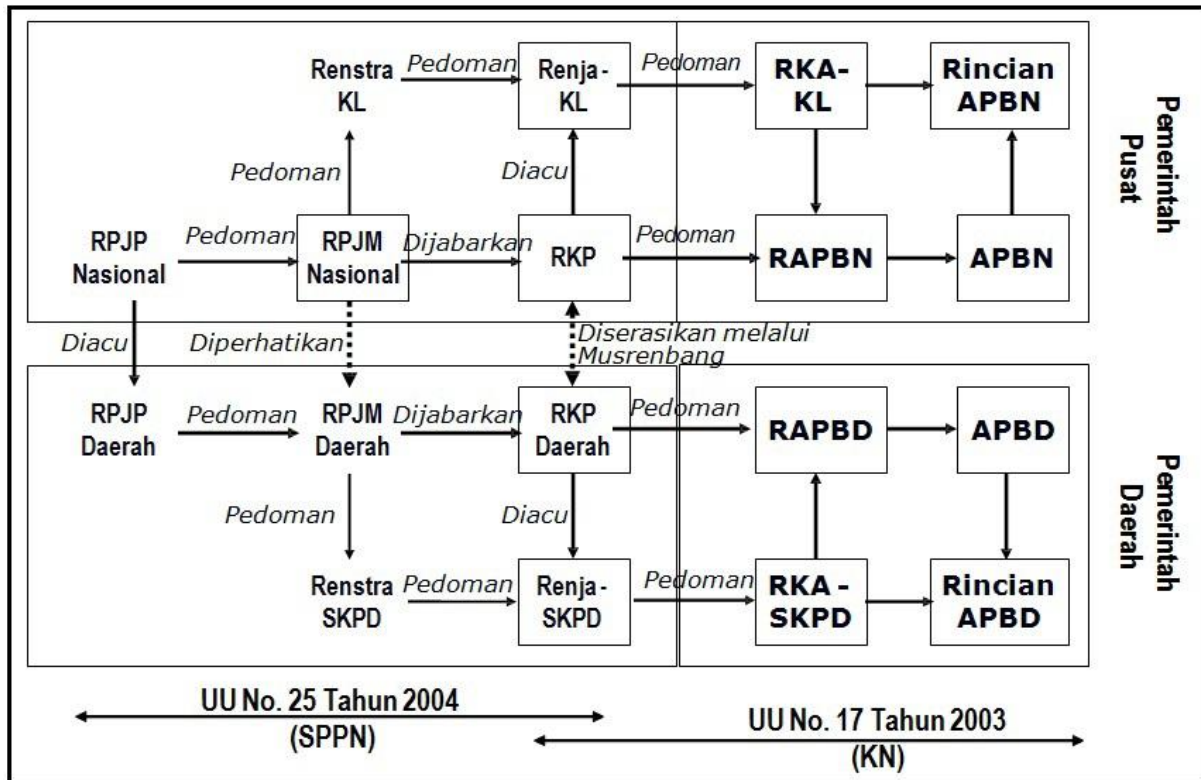
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan amanat Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Kapanewon Sedayu. Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2026 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2026 akan menjadi pedoman dalam menyusun RKA Tahun 2026 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2026.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1. Gambar tersebut menjelaskan bahwa Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada RKPD dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah serta menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2026 disusun dengan berpedoman hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51);
- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 32).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2026.
- 2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
  - 1.2. Landasan Hukum
  - 1.3. Maksud dan Tujuan
  - 1.4. Sistematika Penulisan

- BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
  - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
  - 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
  - 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
  - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V. PENUTUP

## **BAB II.**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026**

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 mencakup:

1. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2024,
2. Evaluasi Tahun 2024 tersebut dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Kapanewon Sedayu Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program, kegiatan, subkegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2024 dan perkiraan realisasi Tahun 2025.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2024 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2024. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2024 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2024 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan  
Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Sedayu

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Tahun 2024			Target Kinerja 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	-	100	100	100	100	100	100	-
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	-	100	100	100	100	100	100	-
2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	Mangayubagya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur		1	-	-	-	-	1	
		Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY		1	-	-	-	-	1	
		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	-	-	1	1	100	1	2	

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Tahun 2024			Target Kinerja 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
4.00	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>									
4.01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>									
04.01.04	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>	<b>Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4.01.04.5.01	<b>Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Keistimewaan</b>	<b>Capaian Kinerja Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon dan Kalurahan</b>	-	-	-			<b>100</b>	<b>100</b>	
4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	-	-	-	-	-	4	4	-
04.01.04.5.06	<b>Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan</b>	<b>Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
04.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon	3	<b>3</b>					<b>3</b>	<b>100</b>

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Tahun 2024			Target Kinerja 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
		Dokumen Hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan keistimewaan Tingkat kapanewon	1	1					1	100
		Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan	1	1					1	100
		Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon tahun 2025	1	1					1	100
		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	6		3	3	100	-	3	50%
7.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai AKIP</b>	<b>89</b>	<b>82,27</b>	<b>87</b>	<b>82.74</b>	<b>95,10</b>	<b>88</b>	<b>82,75</b>	<b>92,98%</b>
7.01.01.2.01	<b>Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	6	6	-	-	-	-	6	100%
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28	7	7	7	100	7	21	75%
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi	6	6	-	-	-	-	6	100%
		Dokumen Keuangan	22	22	-	-	-	-	22	100%



Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Tahun 2024			Target Kinerja 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
7.01.01.02.5.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	16	4	4	4	100	4	12	75%
<b>7.01.01.02.6</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
7.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik	11	11					11	<b>100</b>
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	4	4	4	100	4	12	75%
7.011.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	23	23					23	100
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	4	4	4	100	4	12	75%
7.01.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bahan, peralatan kebersihan dan alat perlengkapan rumah tangga	17	17			-		17	100%
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16	4	4	4	100	4	12	75
7.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan	3	3	-	-	-	-	3	100
		Penggandaan	35.105	35.104					<b>35.104</b>	<b>100</b>
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	16	4	4	4	100	4	12	75%
7.01.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Bahan Bacaan dan perundang-undangn	3	3					3	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Tahun 2024			Target Kinerja 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
	Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	3	3	3	100	3	3	100%
7.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan rapat-rapat	56	56					<b>56</b>	<b>100</b>
		perjalanan dinas dalam daerah	350	350					<b>350</b>	<b>100</b>
		perjalanan dinas luar daerah	2	2					<b>2</b>	<b>100</b>
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.528	417	297	313	105	382	1.112	72,77
7.01.01.2.0 6.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	laporan penataan arsip	12	12						<b>100</b>
Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		4	1	1	1	100	1	3	75	
7.01.01.2.0 6.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	1	1	1	100	1	3	75
<b>7.01.01.02 .7</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>100</b>
7.01.01.2.0 7.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12	2	1	1	100	-	3	25
7.01.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pengadaan peralatan dan mesin	3	3	-	-	-	-	3	100
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	26	5	2	2	100	3	10	38,46

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Tahun 2024			Target Kinerja 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
		Disediakan								
<b>7.01.01.02.8</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Capaian kinerjaCapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
7.01.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	100	40	-	-	-	-	40	40
7.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran rekening listrik dan telephon	12	12	-	-	-	-	12	100
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	12	12	12	100	12	36	75
7.01.01.2.0 8.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaiki peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	3	-	-	-	-	3	150
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	4	4	4	100	4	12	75
7.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kebersihan lingkungan kantor	24	24					<b>24</b>	<b>100</b>
		laporan keamanan dan ketertiban	4	4					<b>12</b>	<b>100</b>
		laporan kegiatan pelayanan umum	12	12					<b>12</b>	<b>100</b>
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16	3	4	4	100	4	11	68,75

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Tahun 2024			Target Kinerja 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
7.01.01.02.9	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
7.01.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan	pemeliharaan kendaraan dinas	9	9					<b>9</b>	<b>100</b>
7.01.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	6	6	6	100	6	6	120
7.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	2	2					<b>2</b>	<b>100</b>
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	8	2	1	1	100	2	5	63
07.01.2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</b>	<b>94</b>	<b>100</b>	<b>91</b>	<b>100</b>	<b>109,89</b>	<b>92</b>	<b>100</b>	<b>108,7</b>
07.01.02.2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>111,11</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>111,11</b>
07.01.02.2.	Koordinasi/Sinergi	laporan koordinasi	4	4					<b>4</b>	<b>100</b>



Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Tahun 2024			Target Kinerja 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
07.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan	90	100	90	100	111,11	90	100	111,11
07.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita Acara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	2	2	-	-	-	-	2	100%
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7	7	7	7	100	7	7	100
07.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan bidang sosial	16	16					16	100
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	28	8	8	8	100	7	25	89,29
07.01.03.02.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	90	100	90	100	111,11	90	100	111,11
07.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pedukuhan	5	5					5	100
		Laporan pendampingan pengembangan usaha kelompok masyarakat	7	7					7	100



Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Tahun 2024			Target Kinerja 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
07.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100	100	100	100	100	100	100	100
07.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Laporan Pembinaan Peningkatan Ketahanan Nasional	8	2	-	-	-	-	2	25
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	400	80	170	170	100	100	350	87,5

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2024 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Indikator program tidak tercapai. Pelaksanaan penilaian saat ini telah menggunakan PermenPANRB no. 88 Tahun 2021, yang harus didahului dengan melakukan evaluasi AKIP mandiri oleh Perangkat Daerah dengan kelengkapan bukti dukung. Sehingga pelaksanaan evaluasi pada pengukuran kinerja instansi pemerintah lebih kompleks dengan penyempurnaan kriteria penilaian oleh APIP.

2. Kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Kerjasama yang baik antara kapanewon, kalurahan, pelaku UMKM, dan pelaku seni
1.1	Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Kerjasama yang baik antara kapanewon, kalurahan, pelaku UMKM, dan pelaku seni
1.1.1	Subkegiatan Gelar Budaya Jogja	Kerjasama yang baik antara kapanewon, kalurahan, pelaku UMKM, dan pelaku seni
2	Program Penyelenggaraan	Adanya pendampingan dari DIY dan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Perangkat Daerah pengampu urusan
2.1	Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Adanya pendampingan dari DIY dan Perangkat Daerah pengampu urusan
2.1.1	Subkegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Adanya pendampingan dari DIY dan Perangkat Daerah pengampu urusan Kerjasama yang baik antara aparat kapanewon, kalurahan, dan OPD terkait
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Kerjasama yang baik antara ASN dan Non ASN kapanewon
3.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Adanya kerja sama yang baik antar jawatan Adanya aplikasi yang memadahi dalam penyusunan dokumen
3.1.1	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kegiatan tepat waktu Peran dari pelaksana kegiatan yang aktif dalam perencanaan Adanya pendampingan dari Bappeda, BPKPAD, dan Bagian Organisasi Adanya aplikasi yang memadahi dalam penyusunan dokumen
3.1.2	Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Adanya kerja sama yang baik antar jawatan/subbag selaku pengampu kegiatan Adanya pendampingan dari Bappeda dan Bagian Organisasi Evaluasi capaian kinerja dilaksanakan secara rutin dan terdokumentasi dalam sistem IT
3.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Adanya aplikasi yang memadahi dalam pengadministrasian keuangan
3.2.1	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pengadministrasian penyediaan gaji dan tunjangan tepat waktu
3.2.2	Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pengadministrasian penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN tepat waktu
3.2.3	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Koordinasi dan kerjasama yang baik antar pejabat struktural Kapanewon selaku pelaksana kegiatan dan penyusun laporan.

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
3.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Adanya komunikasi dan kerjasama yang baik antar ASN dan Non ASN
3.3.1	Subkegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Adanya komunikasi dan kerjasama yang baik antar ASN dan Non ASN
3.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sarana peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai
3.4.1	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Barang yang dibutuhkan mudah diperoleh
3.4.2	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Barang yang dibutuhkan mudah diperoleh
3.4.3	Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Barang yang dibutuhkan mudah diperoleh
3.4.4	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jarak dekat dengan penyedia
3.4.5	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Barang yang dibutuhkan mudah diperoleh
3.4.6	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Adanya dukungan dari forkopimkap, kalurahan, lintas sektor, dan stakeholder terkait
3.4.7	Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Adanya sarana prasarana yang menunjang pengarsipan dokumen
3.4.8	Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Adanya kerjasama yang baik dengan pelaksana kegiatan dan pendamping (fasilitator)
3.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya rekanan yang memenuhi kualifikasi;
3.5.1	Subkegiatan Pengadaan Mebel	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan
3.5.2	Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan
3.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
3.6.1	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan sesuai dengan perencanaan
3.6.2	Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Adanya penyedia jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor yang kompeten;
3.6.3	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan	Terencana sesuai dengan kebutuhan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Umum Kantor	
3.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Adanya penyedia jasa pemeliharaan BMD yang berkompeten dan berpengalaman
3.7.1	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas sesuai dengan perencanaan
3.7.2	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya rekanan yang berkompeten dan berpengalaman;
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Adanya kerjasama yang baik antar jawatan dan kalurahan
4.1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi dan komunikasi yang intensif dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
4.1.1	Subkegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Forkopimkap
4.1.2	Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi terkait pemenuhan administrasi pemerintahan dan pendampingan kepada kalurahan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada
4.2	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Sarana dan prasarana pelayanan public yang memadai
4.2.1	Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Adanya SOP Pelayanan. Pelayanan di Kapanewon telah didukung dengan pelaksana dari SDM yang berkomitmen, sehingga layanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik.
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Adanya kerjasama yang baik dengan kalurahan, kelompok masyarakat, dan stakeholder terkait.
5.1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Adanya koordinasi yang intensif dengan Kalurahan dan stakeholder terkait
5.1.1	Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Partisipasi dan antusias masyarakat (Lembaga Kemasyarakatan) dalam menghadiri

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Perencanaan Pembangunan di Desa	Musrenbang di wilayah kapanewon yang baik.
5.1.2	Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pembinaan / pemberdayaan kepada Kelompok sosial kemasyarakatan, berjalan dengan baik, adanya kerjasama yang baik dengan Instansi terkait, Pendamping PKH, TKPK, dan TKSK
5.2	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Banyaknya potensi wilayah yang bisa dikembangkan
5.2.1	Subkegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Pemberdayaan kelompok UMKM dapat berjalan dan terkoordinasi dengan baik
6.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Terjalannya koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan TNI/POLRI serta instansi vertikal tingkat kapanewon
6.1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terjalannya koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan TNI/POLRI serta instansi vertikal tingkat kapanewon
6.1.1	Subkegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Linmas, pengendalian keamanan Lingkungan, ketentraman dan ketertiban umum terkoordinasi dengan baik bersama pihak TNI/POLRI kalurahan dan linmas. Untuk penanggulangan bencana sudah terbentuk FPRB di tingkat kalurahan dan kapanewon.
7	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terjalannya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan TNI/POLRI serta instansi vertikal tingkat kapanewon
7.1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terjalannya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan TNI/POLRI serta instansi vertikal tingkat kapanewon
7.1.1	Subkegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,	Kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional terhadap generasi muda, pemberdayaan ormas dan organisasi keagamaan/kemasyarakatan terkoordinasi dengan baik bersama Forkopimkap.

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2026 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan optimalisasi penguatan kapasitas SDM dan Kelembagaan berbasis IT dan Kinerja;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran;
3. Meningkatkan koordinasi dan evaluasi pencapaian akuntabilitas kinerja kapanewon
4. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait, sebagai upaya menyusun sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan yang tepat dan akurat

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kapanewon Sedayu berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2024 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta memperhatikan IKU pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Sedayu  
Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi			Target	
			2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Angka	94,22	95,21	96,77	96,80	
2	Indek Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	n/a	n/a	n/a	3,70	3,80
3	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	n/a	n/a	n/a	92,92	93,08

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Sedayu Tahun 2024 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa IKU Kapanewon Sedayu dapat memenuhi target.

IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Tersedianya SOP Pelayanan Kapanewon
- b. Tersedianya SDM dan sarana prasarana pendukung kegiatan pelayanan;
- c. Tersedianya media informasi dan komunikasi dengan masyarakat untuk menyampaikan aduan pelayanan dalam upaya evaluasi kinerja
- d. Pemantapan prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan;
- e. Prosedur pelayanan satu pintu;
- f. Komitmen pimpinan dan staf untuk menghilangkan PUNGLI dan melakukan percepatan terhadap pelayanan;
- g. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan forkopimkap, kalurahan, instansi dan stakeholder terkait

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Kapanewon Sedayu Tahun 2024 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan

pada Tahun 2026 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya SOP Pelayanan Kapanewon;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima dan memberikan informasi PATEN melalui media cetak, elektronik dan social;
4. Memperkuat koordinasi antara Kapanewon dengan Kalurahan dan stakeholders terkait;
5. Meningkatkan koordinasi wilayah dan fasilitasi dalam upaya mengembangkan potensi ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat lainnya;
6. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi hal ketentraman, ketertiban serta penanggulangan terhadap potensi kebencanaan;
7. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi secara intensif dalam upaya penyelenggaraan stabilitas pemerintahan umum
8. Meningkatkan fungsi bimbingan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan dan dana keistimewaan di kalurahan..

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat**

#### **Daerah**

Kapanewon Sedayu merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan pada Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.5

#### **Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2024**

Kekuatan	Kelemahan
Komitmen melayani dan menjalankan tugas pokok fungsi Kapanewon sebagai unsur	Kapasitas dan kemampuan SDM di bidang IT kurang memadai

Kekuatan	Kelemahan
penunjang Pemerintah Kabupaten Bantul.	
Tersedianya dukungan SOP dan Regulasi yang jelas tentang tugas dan fungsi kapanewon	Pengelolaan system informasi atau data untuk pelayanan publik belum terpadu
Pola kepemimpinan yang mampu memberi contoh mendorong motivasi kerja.	Kompetensi dan profesionalitas aparatur belum memadai.
Koordinasi dan sinergi serta kerjasama yang kuat antar stakeholders (forkompimkap, para lurah beserta pamong, tokoh masyarakat, tokoh agama, dsb.)	Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu system yang terpadu, efektif dan efisien

Selain itu, selama Tahun 2024 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2024

Peluang	Tantangan
Kemajuan teknologi dan sarana prasarana pendukung pelayanan	Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan akurat
Adanya potensi produk-produk unggulan setempat dan terdapat banyak pelaku UMKM	Menumbuhkan UMKM dengan produk yang berdaya saing
Sedayu sebagai Kawasan industri dan adanya peluang sebagai CSR bagi perusahaan di wilayah Sedayu	Masih tingginya permasalahan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial seperti stunting, kasus ODGJ, dan depresi.
Wilayah Kapanewon Sedayu merupakan kawasan peruntukan pertanian yang didukung lahan pertanian yang luas	-Termasuk daerah rawan kekeringan, untuk wilayah sedayu bagian selatan -Kesadaran masyarakat dalam pengembangan hasil pertanian masih kurang -Pertanian masih tradisional dan kurangnya regenerasi petani
Komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul dalam penerapan teknologi (SPBE) untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	- Perkembangan wilayah permukiman/ perumahan - Adanya potensi terjadinya gesekan kepentingan - Dampak lingkungan yang ditimbulkan (banyaknya sampah rumah tangga) - Potensi kerusakan dan resiko bencana akibat adanya perubahan fungsi lahan - Resiko bencana banjir di titik-titik tertentu dan pohon tumbang ketika musim penghujan - Masih tingginya kemiskinan ekstrim yang perlu intervensi

Peluang	Tantangan
Adanya kewenangan dan tanggungjawab kapanewon untuk melaksanakan Binwas pada kalurahan dapat menciptakan sinergi yang lebih baik antara kalurahan dan kapanewon	Beban administrasi yang meningkat dan keterbatasan kapanewon dalam hal sumber daya untuk melaksanakan bimbingan dan pengawasan secara efektif kepada kalurahan
Adanya Dana Keistimewaan yang dapat diakses untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kewilayahan	Menemukan potensi wilayah untuk Pemberdayaan Masyarakat sebagai upaya meraih dana keistimewaan

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2024, maka strategi pada Tahun 2026 yang akan dilakukan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan standar pelayanan prima kepada masyarakat dan inovasi yang berkaitan dengan pelayanan
2. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan dan kegiatan kapanewon
3. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi dalam mengupayakan sinergitas pembangunan kewilayahan bidang ekonomi, lingkungan hidup, dan pembangunan infrastruktur pelayanan publik, serta mendukung pencapaian Bantul Bebas Sampah.
4. Meningkatkan koordinasi pengembangan potensi wilayah serta produk unggulan guna peningkatan perekonomian masyarakat, sebagai upaya penurunan angka kemiskinan.
5. Meningkatkan koordinasi terkait bidang kesehatan, pendidikan, kepemudaan, sosial kemasyarakatan dan kebudayaan
6. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dan perubahan iklim.
7. Meningkatkan intensitas kegiatan bimbingan, pengawasan, monitoring dan pengendalian pengelolaan keuangan serta pemerintahan, di Tingkat Kalurahan
8. Meningkatkan peran swasta, atau sumber dana lain yang dapat diakses dalam upaya peningkatan pembangunan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi;

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026**

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Sedayu Tahun 2026. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

## Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Sedayu

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	<b>Kap. Sedayu</b>	<b>Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi</b>	<b>100 Persen</b>	<b>0</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	<b>Kap. Sedayu</b>	<b>Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100.000.000</b>	
1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan		0	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Capaian pelaksanaan kegiatan adat dan tradisi di kapanewon	100 Persen	100.000.000	
1	Gelar Budaya Jogja		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta		0	Gelar Budaya Jogja		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1	100.000.000	Sesuai BA Danais Tahun 2026
II	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>	<b>Kap. Sedayu</b>	<b>Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Yang Berkualitas</b>	<b>100 persen</b>	<b>116.040.000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>	<b>Kap. Sedayu</b>	<b>Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi</b>	<b>100 persen</b>	<b>40.000.000</b>	
			<b>Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul</b>	<b>85 Persen</b>							

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	<b>Peningkatan Budaya Pemerintahan</b>		<b>Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan</b>	<b>83 persen</b>	<b>50.000.000</b>						
2	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000					0	
3	<b>Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan keistimewaan</b>		<b>Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan</b>	<b>100 persen</b>	<b>66.040.000</b>	<b>Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan</b>		<b>Capaian pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>40.000.000</b>	
3	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	2 Dokumen	66.040.000	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun			Diganti dengan Subkegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan
4	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi			Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi	2 Dokumen	40.000.000	Sesuai BA Danais Tahun 2026

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kap. Sedayu</b>	<b>Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)</b>	<b>89 angka</b>	<b>4.326.237.714</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kap. Sedayu</b>	<b>Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)</b>	<b>82,82</b>	<b>3.423.791.705</b>	
								<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah</b>	<b>96,84</b>		
4	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>26.000.000</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>4.950.000</b>	
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	20.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	3.150.000	
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	6.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1.800.000	
5	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>2.781.217.714</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>2.970.236.919</b>	
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/Bulan	2.651.217.714	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/Bulan	2.920.751.919	
8	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	125.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	48.360.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan, Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	22 Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	22 Laporan	1.125.000	
6	<b>Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah</b>		<b>Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian</b>	<b>100 persen</b>	<b>6.000.000</b>	<b>Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah</b>		<b>Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian</b>	<b>100 persen</b>	<b>2.400.000</b>	
10	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	6.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	2.400.000	
7	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum</b>	<b>100 persen</b>	<b>447.500.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum</b>	<b>100 persen</b>	<b>150.537.298</b>	
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	45.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.891.475	
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	29.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	14.836.683	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	12.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	5.635.140	
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	35.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	13.317.000	
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	5.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	2.750.000	
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	382 Laporan	300.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114 Laporan	102.882.000	
17	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	15.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	2.325.000	
18	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	6.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	3.900.000	
<b>8</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>255.000.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>28.850.000</b>	
19	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 unit	45.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit		

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	210.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	28.850.000	
<b>9</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>305.000.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>141.788.588</b>	
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	75.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	42.900.000	
22	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	40.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	10.340.000	
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	190.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	88.548.588	
<b>10</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>505.520.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>125.028.900</b>	
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	205.520.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 unit	117.208.500	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	300.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara / Direhabilitasi	3 unit	7.820.400	
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Kap. Sedayu</b>	<b>Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>94 persen</b>	<b>40.900.000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Kap. Sedayu</b>	<b>Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan</b>	<b>100 persen</b>	<b>26.700.000</b>	
<b>1</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		<b>Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon</b>	<b>90 persen</b>	<b>25.900.000</b>	<b>Koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		<b>Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kapanewon</b>	<b>100 persen</b>	<b>21.500.000</b>	
26	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	13.050.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	6.800.000	
27	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	12.850.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 dokumen	14.700.000	
<b>1</b> <b>2</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>		<b>Capaian kinerja pelayanan Kapanewon</b>	<b>90 persen</b>	<b>15.000.000</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>		<b>Cakupan koordinasi pelayanan kapanewon</b>	<b>100 persen</b>	<b>5.200.000</b>	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	15.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	5.200.000	
<b>V</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Kap. Sedayu</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan kepada Masyarakat</b>	<b>100 persen</b>	<b>75.900.000</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Kap. Sedayu</b>	<b>Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>100 persen</b>	<b>93.425.000</b>	
<b>13</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>		<b>Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat kalurahan</b>	<b>90 persen</b>	<b>43.700.000</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>		<b>Cakupan koordinasi pemberdayaan masyarakat kalurahan</b>	<b>100 persen</b>	<b>55.175.000</b>	
29	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000	
30	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	33.700.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	35.175.000	
<b>14</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>		<b>Capaian kineja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan</b>	<b>90 persen</b>	<b>32.200.000</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>		<b>Cakupan koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kapanewon</b>	<b>100 persen</b>	<b>38.250.000</b>	
31	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5 Laporan	32.200.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan	38.250.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VI	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Kap. Sedayu</b>	<b>Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan</b>	<b>100 persen</b>	<b>49.500.000</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Kap. Sedayu</b>	<b>Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>100 persen</b>	<b>20.050.000</b>	
15	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>		<b>Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>100 persen</b>	<b>49.500.000</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>		<b>Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon.</b>	<b>100 persen</b>	<b>20.050.000</b>	
32	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	49.500.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	20.050.000	Kegiatan HUT RI dialihkan ke Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
VI I	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Kap. Sedayu</b>	<b>Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum</b>	<b>100 persen</b>	<b>188.000.000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Kap. Sedayu</b>	<b>Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum</b>	<b>100 persen</b>	<b>147.230.000</b>	
16	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>		<b>Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum</b>	<b>91 persen</b>	<b>188.000.000</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>		<b>Cakupan koordinasi pemerintahan umum di Kapanewon</b>	<b>100 persen</b>	<b>147.230.000</b>	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	188.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	660 Orang	147.230.000	
	<b>JUMLAH</b>				<b>4.796.577.714</b>					<b>3.851.196.705</b>	

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam penyusunan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2026, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2026 serta tugas dan fungsi Kapanewon Sedayu.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, tidak ada usulan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Sedayu.

## **BAB III.**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Tema pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif" dengan Prioritas Nasional meliputi:

1. Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;

7. Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Delapan prioritas tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor langkah-langkah berupa program hasil terbaik cepat/*quick wins* sebagai berikut:

Tabel 3.1 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat

PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air.	1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara.	2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten.
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.	3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi.	4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.
5. Pemberantasan kemiskinan.	5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba.	
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.	
8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi.	
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan	

<p>internasional yang kondusif.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.</li> <li>11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup.</li> <li>12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani.</li> <li>13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau, bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan.</li> <li>14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif, karakteristik-mandiri lainnya.</li> <li>15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.</li> <li>16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah.</li> <li>17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga.</li> </ol>	<p>usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Kenaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara.</li> <li>7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).</li> <li>8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.</li> </ol>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional Tahun 2026 tersebut, maka kebijakan dan langkah strategis yang akan ditempuh oleh Kapanewon Sedayu Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan berbasis IT dan kinerja, serta memperkuat sistem pengendalian internal.
2. Meningkatkan kinerja pelayanan berbasis teknologi informasi dan berorientasi pada kepuasan Masyarakat.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif melalui fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan kalurahan berdasarkan potensinya;
4. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi secara intensif dalam mewujudkan sinergitas pembangunan kewilayahan yang terpadu;
5. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi secara intensif dalam upaya penyelenggaraan stabilitas pemerintahan umum,
6. Penguatan BUMKal (Badan Usaha Milik Kalurahan), dan BUMKalma (Badan Usaha Milik Bersama).
7. Memperkuat koordinasi dan pendampingan untuk program ketahanan pangan, penurunan kemiskinan, dan stunting.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tema Pembangunan Tahun 2026 dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026 adalah "Penguatan Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan Didukung SDM Berkualitas dan Infrastruktur Berkelanjutan" dengan Prioritas Daerah (PD) sesuai Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- PD-1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.
- PD-2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.
- PD-3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.
- PD-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.
- PD-5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.



## **BAB IV.**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Sedayu Tahun 2026 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Kapanewon Sedayu Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027  
Kabupaten Bantul

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					Kapanewon Sedayu						3.895.260.120,00						3.888.625.814,00			
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						100.000.000,00						100.000.000,00			
	2 2 2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						100.000.000,00						100.000.000,00			
1	2	2	0		PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	-			100 Persen	100.000.000,00						-	100.000.000,00		
	2	2	0	5.0	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian pelaksanaan kegiatan adat dan tradisi di kapanewon	-			100 Persen	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kapanewon Sedayu	-	100.000.000,00		
	2	2	0	5.0	Gelar Budaya Jogja															
				00		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/De sa	BANTUA N KEUANG AN KHUSUS DARI PEMERIN TAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kapanewon Sedayu		100.000.000,00	KAPANEWO N SEDAYU	
	4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						35.996.000,00						35.000.000,00			
	4 0 1				SEKRETARIAT DAERAH						35.996.000,00						35.000.000,00			
2	4	0	0		PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSAN AAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	-			100 Persen	35.996.000,00						-	35.000.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	4	0	0	5.0		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Capaian pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan	-			100 Persen	35.996.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kapanewon Sedayu	-	35.000.000,00			
	4	0	0	5.0	00	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														07		
						Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi					2 Dokumen	35.996.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kapanewon Sedayu		35.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						3.759.264.120,00								3.753.625.814,00		
	7	0				KECAMATAN						3.759.264.120,00									3.753.625.814,00	
3	7	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	-			81,21 Angka 96,79 Indeks	3.445.565.620,00							-	3.477.677.531,00		
	7	0	0	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	-			100 Persen	4.950.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Aparatur Kapanewon Sedayu	-	6.300.000,00			
	7	0	0	2.0	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														01		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	3.150.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Aparatur Kapanewon Sedayu		3.600.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7	0	0	2.0	00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	1.800.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Aparatur Kapanewon Sedayu		2.700.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7	0	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	-			100 persen	2.970.236.919,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Aparatur Kapanewon Sedayu	-	2.974.024.419,00	
	7	0	0	2.0	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	2.920.751.919,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Aparatur Kapanewon Sedayu		2.923.751.919,00	KAPANEWON SEDAYU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	0	0	2.0	00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
		1	1	2	02		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	48.360.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Aparatur Kapanewon Sedayu		48.960.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7	0	0	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
		1	1	2	07		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	1.125.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Aparatur Kapanewon Sedayu		1.312.500,00	KAPANEWON SEDAYU
	7	0	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			100 persen	2.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Aparatur Kapanewon Sedayu	-	4.500.000,00	
	7	0	0	2.0	00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
		1	1	5	05		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	2.400.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas	Aparatur Kapanewon Sedayu		4.500.000,00	KAPANEWON SEDAYU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															dan berkeadilan					
	7	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	-			100 persen	192.891.185,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Aparatur Kapanewon Sedayu	-	188.917.988,00	
	7	0	0	2.0	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
		1	1	6	01		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4.770.325,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Aparatur Kapanewon Sedayu		5.568.260,00	KAPANEWON SEDAYU
	7	0	0	2.0	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		1	1	6	02		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	73.847.660,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Aparatur Kapanewon Sedayu		55.742.428,00	KAPANEWON SEDAYU
	7	0	0	2.0	00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
		1	1	6	03		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4.978.600,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan	Aparatur Kapanewon Sedayu		5.228.300,00	KAPANEWON SEDAYU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional					Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
															narkoba, judi, dan penyeludupan.	dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan					
	7	0	0	2.0	00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															05
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					4 Paket	12.054.600,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Aparatur Kapanewon Sedayu		12.054.000,00	KAPANEWON SEDAYU	
	7	0	0	2.0	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															06
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12 Dokumen	2.750.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Aparatur Kapanewon Sedayu		3.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU	
	7	0	0	2.0	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															09
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					298 Laporan	89.360.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Aparatur Kapanewon Sedayu		99.825.000,00	KAPANEWON SEDAYU	
	7	0	0	2.0	00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD															10

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	2.280.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Aparatur Kapanewon Sedayu		3.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7 0 1 0 1 2.0 00		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	2.850.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Aparatur Kapanewon Sedayu		4.500.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7 0 1 0 1 2.0 00		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	-		100 persen	3.300.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Aparatur Kapanewon Sedayu	-	6.000.000,00	
	7 0 1 0 1 2.0 00		Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	3.300.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Aparatur Kapanewon Sedayu		6.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	0	0	2.0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 persen	141.618.116,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Aparatur Kapanewon Sedayu	-	154.120.124,00	
	1	1	8																
	7	0	0	2.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
				00						12 Laporan	40.680.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Aparatur Kapanewon Sedayu		42.500.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7	0	0	2.0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
				00						4 Laporan	12.450.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Aparatur Kapanewon Sedayu		14.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7	0	0	2.0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
				00						36 Laporan	88.488.116,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas	Aparatur Kapanewon Sedayu		97.620.124,00	KAPANEWON SEDAYU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional					Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
															dan berkeadilan						
	7	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	-			100 persen	130.169.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Aparatur Kapanewon Sedayu	-	143.815.000,00		
	7	0	0	2.0	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															01
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	121.793.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Aparatur Kapanewon Sedayu		128.815.000,00	KAPANEWON SEDAYU	
	7	0	0	2.0	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															09
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	8.376.400,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Aparatur Kapanewon Sedayu		15.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU	
4	7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	-			81 Persen	27.950.000,00							-	27.358.642,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	0	0	2.0		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	-			100 Persen	22.750.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kapanewon Sedayu	-	21.950.000,00	
	7	0	0	2.0	00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
		1	2	1	01		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	7.750.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kapanewon Sedayu		6.800.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7	0	0	2.0	00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
		1	2	1	02		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kapanewon Sedayu		15.150.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7	0	0	2.0		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan koordinasi pelayanan kapanewon	-			100 Persen	5.200.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kapanewon Sedayu	-	5.408.642,00	



No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	48.911.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kapanewon Sedayu		34.200.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7	0	0	2.0		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				100 Persen	44.824.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kapanewon Sedayu	-	35.850.000,00	
	7	0	0	2.0	00	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat													
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				4 Laporan	44.824.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kapanewon Sedayu		35.850.000,00	KAPANEWON SEDAYU
6	7	0	0			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				100 persen	17.533.000,00						-	17.777.994,00	
	7	0	0	2.0		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				100 persen	17.533.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan	Masyarakat Kapanewon Sedayu	-	17.777.994,00	

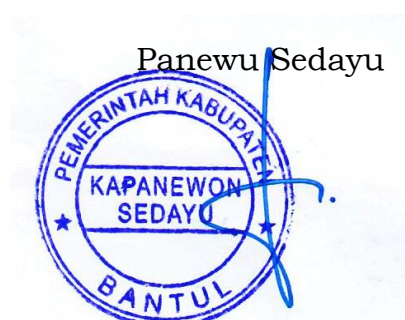
No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional					Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
															dan penyeludupan.	publik yang berkualitas dan berkeadilan					
	7	0	0	2.0	00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan															
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	17.533.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kapanewon Sedayu		17.777.994,00	KAPANEWON SEDAYU	
7	7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	-			100 Persen	154.480.500,00						-	144.329.647,00		
	7	0	0	2.0		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan koordinasi pemerintahan umum di Kapanewon	-			100 Persen	154.480.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kapanewon Sedayu	-	144.329.647,00		
	7	0	0	2.0	00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				105 Orang	154.480.500,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kapanewon Sedayu		144.329.647,00	KAPANEWON SEDAYU	
<b>J U M L A H</b>											<b>3.895.260.120,00</b>									<b>3.888.625.814,00</b>	

## **BAB V.**

### **PENUTUP**

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2026. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2026. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2026. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.



ANTON YULIANTO, AP.,M.I.P

NIP. 197707261995111001